SEJARAH KEMBALINYA STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN NEGERI DARI ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KOTA AMBON

Andrew Huwae*

Abstract

Ambon city has unique characteristics of government comparing with any other province in Indonesia. One of the characteristics that more obvious from this government is prescriptive law, where it necessary recognize, respectful, obliged to perform and it forbidden to break the laws by societies.

Key Words : *Ambon city, unique characteristics, prescriptive law and societies*

A. Pendahuluan

Ambon, Ibukota Propinsi Maluku terletak didalam teluk Ambon yang indah permai, dan sering pula disebut dengan nama Amboina. Kota ini terletak di pulau yang didalam bahasa daerah disebut "Nusa Yapono", yang kemungkinan berarti pulau "Embun". Kota Ambon terletak di jazirah Leitimur dan memanjang melalui pesisir teluk Ambon bagian luar. Dibelakang kota itu menjulang pegunungan Soya dengan puncak-puncak seperti Gunung Nona dan Sirimau yang ditutupi oleh hutan dan padang rumput yang hijau subur (Pattikayhatu J.A.1973).

Kota Ambon adalah kota yang sungguh bersejarah, baik dalam sejarah Maluku, sejarah Nusantara maupun sejarah dunia. Dalam lintasan sejarahnya yang hampir empat setengah abad itu, kota Ambon silih berganti menjadi pusat pemerintahan dari berbagai kekuasaan, pusat kegiatan politik, bandar samudera bagi dunia perdagangan, pusat pendidikan dan kebudayaan serta pusat kegiatankegiatan kehidupan keagamaan, bahkan dalam zaman kolonial Belanda, Amboina pernah menjadi pusat kedudukan para Gubernur Jenderal pertama V.O.C. di Nusantara.

Di Maluku khususnya di pulau Ambon dan kepulauan Lease, sistem desa dinamakan Negeri. Struktur masyarakat yang dinamakan negeri tersebut sebetulnya baru timbul pada abad ke- 17 ketika masa V.O.C. Mengenai struktur dan sistem pemerintahan negeri dan para latupatnya yang berawal di masa V.O.C., dilanjutkan lagi dalam masa Hindia Belanda (1817-1942) dapat dijelaskan sebagai berikut (R.Z. Leirissa, Dkk. 1983). Bahwa sejak tahun 1824 sistem itu telah dibakukan dalam sebuah Regerings Reglement (Keputusan Pemerintah) yang dimuat dalam Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1824 No.19a. Pengaturan pemerintahan di wilayah Ambon dan Saparua, diatur dalam Staatsblad tersebut (Het Inlandsch bestuur over de onderafdeelingen Amboina en Saparua is gebaseerd op het Reglement on het bunnenlandsch bestuur opgenomen in Staatsblad 1824 No.19a). Dalam bagian III, "Verdeeling in Districten" disebutkan bahwa "wat nu de Onderafdeeling Amboina besreft, wordt de verdeeling in een district en twee onderdistricten met aan het hoofd inlandsche bestuursamtenaren, met gelijktijdige afschaffing van de volgens Staatsblad 1911 No. 631 sub V en den Assistent Resident toegevoegden (civiel) Gerarghebber, noodzakelijk geacht". Selanjutnya Onderafdeeling Ambon dibagi dalam satu district dan dua district bawahan yang dikepalai oleh seorang Assistant Resident dan seorang Geraghebber (Staatsblad) 1911 No.631. Pembagiannya ditetapkan sebagai berikut : A. Onderafdeeling Amboina, B. Onderafdeeling Saparoea. Pada butir IV "Nadere indeeling in districten en onderdistricten", (Afdeeling Amboina) dibagi sebagai berikut :

1. Het District Amboina terdiri atas : Hoofdplaats Amboina (Ibukota Amboina), Nusaniwe, Latoehalat, Silaloe Eri, Amahoesoe, Seri, Soya, Batoe Merah, Oerimessing, Mahia, Hatalai, Nakoo, Kilang, Ema, Hoekoerila, Leahari, Roetong, Hoetoemuri, Alang, Lilibooi, Hatoe, Laha, Tawiri, Hatiwe Besar, Nipa, Roemahtiga, Poka.
2. Het Onderdistrict Hila terdiri atas negeri dan kampung sebagai berikut : Wakasihoe, Larike, Assiloeloe, Oereng, Lima, Seit, Kaitetoe, Hila, Wakal, Hitoelama, Hitoemessing, Mamala, Morela.
3. Het Onderdistrict Passo terdiri dari kampung dan negeri-negeri yakni: Hoenoe, Waeheroe, Nania, Negtilama, Galala, Hatiwe – Ketjil, Halong, Latta, Lateri, Passo, Soeli, Tial Serani, Waai.

Sedangkan kampung Islam yang tercakup dalam Onderdistrict Passo adalah Tial Selam, Tengah-tengah, Toehehu dan Liang.

B. Struktur dan Organisasi Pemerintahan

Dengan dileburnya R.I.S. (Republik Indonesia Serikat) menjadi Negara Kesatuan RI (Republik Indonesia) pada tanggal 17 Agustus 1950 dan setelah pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dapat dilumpuhkan, maka sejak tahun 1952 dikeluarkan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan mengenai pembentukan daerah-daerah otonomi di Maluku. Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara dijadikan Daerah Otonomi Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1952. Wilayah Daerah Ambon dibentuk dengan Undang-Undang No.15 tahun 1955 sebagai daerah otonomi yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dimana wilayahnya adalah bekas "Landschap Kota Ambon tidak sejati yang rendahan" (Pasal 1 Peraturan Presiden Negara Indonesia Timur tanggal 23 Agustus 1948 No.3/PR V/48). Selain hal itu tempat kedudukan Pemerintahan Daerah ialah Ambon (Pasal 2 ayat 1.PP No.15 tahun 1955). Kemudian terbentuk Kotapraja Ambon sesuai Undang-Undang Darurat No.23 tahun 1957 dimana struktur dan organisasi Pemerintahan yang disesuaikan dengan struktur organisasi pemerintahan sebelumnya (PP. No.15 tahun 1955). Kepala Daerahnya bergelar "Walikota". Selanjutnya karena perkembangan masyarakat, telah dibentuk antara lain Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah dan Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon yang termasuk dalam lingkungan wilayah Propinsi Daerah tingkat I Maluku pada tahun 1965. Kemudian dengan semakin meningkatnya perkembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Maluku yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan kegiatan pembangunan di wilayah Daerah Tingkat I Maluku, maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon perlu diperluas dengan memisahkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah untuk dimasukkan kedalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah

Tingkat II Ambon dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI. No.13 tahun 1979.

Mengenai perubahan wilayah pemerintahan dan kedudukan Negeri-Negeri didalamnya dapat dicatat sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut sebagai berikut : Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon diperluas dengan memasukkan sebagian dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah yang merupakan sebagian dari Wilayah Kecamatan Pulau Ambon yang meliputi :

1. Negeri Urimessing dengan Kampung bawahannya Kusu-Kusu Sere, Mahia, Seri dan petuanannya.
2. Negeri Amahusu dan petuanannya.
3. Negeri Eri-Nusaniwe dan petuanannya.
4. Negeri Seilale dan petuanannya
5. Negeri Latuhalat dan petuanannya.
6. Negeri Soya dan petuanannya
7. Negeri Ema dan petuanannya.
8. Negeri Hukurila dan petuanannya
9. Negeri Naku dan petuanannya
10. Negeri Kilang dan petuanannya.
11. Negeri Hatalai dan petuanannya.
12. Negeri Batumerah dan petuanannya
13. Negeri Galala dan petuanannya.
14. Negeri Hative Kecil dan petuanannya.
15. Negeri Passo dengan Kampung bawahannya Negeri Lama, Nania dan petuanannya.
16. Negeri Halong dengan Kampung bawahannya Lata, Lateri, Waiheru dan petuanannya.
17. Negeri Leahari dan petuanannya.
18. Negeri Rutong dan petuanannya
19. Negeri Hutumuri dan petuanannya
20. Negeri Rumahtiga dengan Kampung bawahannya Poka, Waiyame dan petuanannya.
21. Negeri Tawiri dan petuanannya.

22. Negeri Hative Besar dengan Kampung bawahannya Riang, Lata, Soakodo, Lelua, Batu Lubang, Masing, Batu Kubur, Sahuru dan petuanannya.

23. Negeri Laha dan petuanannya

Sedangkan Kecamatan Pulau Ambon yang dihapuskan berupa :

a. Sebagian Wilayah bekas Kecamatan Pulau Ambon yang terdiri dari :

1. Negeri Tulehu dan petuanannya.
2. Negeri Suli dan petuanannya
3. Negeri Wakal dan petuanannya.
4. Negeri Tengah-Tengah dan petuanannya
5. Negeri Waai dan petuanannya.
6. Negeri Liang dan petuanannya.

Menjadi Kecamatan Salahutu berkedudukan di Tulehu

b. Sebagian Wilayah bekas kecamatan Pulau Ambon yang terdiri dari :

1. Negeri Mamala dan petuanannya.
2. Negeri Morela dan petuanannya.
3. Negeri Wakal dan petuanannya.
4. Negeri Hila dan petuanannya.
5. Negeri Kaitetu dan petuanannya.
6. Negeri Seid dan petuanannya.
7. Negeri Lima dan petuanannya.
8. Negeri Ureng dan petuanannya.
9. Negeri Asilulu dan petuanannya.
10. Negeri Larike dan petuanannya.
11. Negeri Hitumessing dan petuanannya.
12. Negeri Hitulama dan petuanannya.
13. Negeri Wakasihi dan petuanannya.
14. Negeri Alang dan petuanannya.
15. Negeri Hatu dan petuanannya.
16. Negeri Liliboi dan petuanannya

Menjadi Kecamatan Leihitu berkedudukan di Hila.

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah maka Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon dibagi dalam 3 (tiga) Kecamatan, yaitu :

a. Kecamatan Nusaniwe

Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak di Benteng dan meliputi lingkungan (Wilayah Kotamadya Ambon lama) dan Negeri-Negeri :

1. Lingkungan Seilale.
2. Lingkungan Urimessing.
3. Lingkungan Benteng.
4. Lingkungan Nusaniwe.
5. Negeri Urimessing dengan Kampung bawahannya Kusu-Kusu Sere, Mahia, Seri dan petuanannya.
6. Negeri Amahusu dan petuanannya.
7. Negeri Eri-Nusaniwe dan petuanannya.
8. Negeri Seilale dan petuanannya.
9. Negeri Latuhalat dan petuanannya.

b. Kecamatan Sirimau

Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak di Karang Panjang dan meliputi lingkungan (Wilayah Kotamadya Ambon lama) dan Negeri-Negeri :

1. Lingkungan Honipopu.
2. Lingkungan Ahusen.
3. Lingkungan Uritetu.
4. Lingkungan Amantelu.
5. Negeri Soya dan petuanannya.
6. Negeri Ema dan petuanannya.
7. Negeri Hukurila dan petuanannya.
8. Negeri Naku dan petuanannya.
9. Negeri Kilang dan petuanannya.
10. Negeri Hatalai dan petuanannya.
11. Negeri Batumerah dan petuanannya.
12. Negeri Galala dan petuanannya.
13. Negeri Hative Kecil dan petuanannya.

c. Kecamatan Teluk Ambon Baguala.

Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak di Passo dan meliputi Negeri-Negeri :

1. Negeri Passo dengan Kampung bawahannya Negeri Lama, Nania dan petuanannya.
2. Negeri Halong dengan Kampung bawahannya Lata, Lateri, Waiheru dan petuanannya.
3. Negeri Lehari dan petuanannya.
4. Negeri Rutong dan petuanannya.
5. Negeri Hutumuri dan petuanannya.
6. Negeri Rumahtiga dengan Kampung bawahannya Poka, Waiyame dan petuanannya.
7. Negeri Hative Besar dengan Kampung bawahannya Rieng, Lata, Soakodo, Lelua, Batu Lubang, Masing, Batu Kubur, Sahuru dan petuanannya.
8. Negeri Tawiri dan Petuanannya.
9. Negeri Laha dan petuanannya.

Peraturan Pemerintah RI. No.13 tahun 1979 yang realisasinya pada tahun 1980, tidak hanya membawa perubahan pada luas wilayah dari 4,02Km², tetapi juga penghapusan Kecamatan Pulau Ambon sekaligus membentuk 5 (lima) Kecamatan baru diantaranya 3 (tiga) Kecamatan masuk dalam Wilayah Pemerintahan Kotamadya Ambon dan 2 (dua) Kecamatan masuk dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Bersama itu pula wilayah Kota Ambon yang sebelumnya terbagi dalam 8 (delapan) lingkungan dikembangkan menjadi 16 (enam belas) Kelurahan dan untuk wilayah-wilayah yang baru dimekarkan dibentuk 23 (dua puluh tiga) Desa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari sisi pemerintahan pemekaran wilayah Kota Ambon telah berimplikasi pada susunan pemerintahan Kotamadya Ambon yang tidak saja Kelurahan dan Kecamatan, tetapi juga masuk pemerintahan Desa di dalamnya. Bahkan pemerintahan Desa telah dimekarkan dari 23 (dua puluh tiga) buah Desa menjadi 30 (tiga puluh) buah Desa, dan Kelurahan dimekarkan dari 16 (enam belas) Kelurahan menjadi 20 (dua puluh) Kelurahan.

Ketika Peraturan Pemerintah RI. No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mulai diberlakukan di seluruh Indonesia termasuk di Maluku, maka terjadilah penghancuran sistem pemerintahan adat di Maluku. Negeri menjadi Desa atau Kelurahan, Raja diganti menjadi Kades (Kepala Desa) atau Lurah, Saniri diganti menjadi LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), Kepala Soa diganti menjadi Ketua RW (Rukun Warga) dan lainnya. Dalam kenyataannya di lapangan, Kades tidak memiliki nilai yang sama dengan Raja. Begitu pula LKMD tidak memiliki nilai yang sama dengan Saniri. Nilai-nilai yang baru ini menjadi asing bagi masyarakat adat, sedangkan nilai-nilai yang lama tidak dipakai lagi. Masyarakat adat di Maluku Tengah/Ambon kehilangan pegangan adatnya. Mereka menjadi rendah diri karena nilai budaya yang dimilikinya ternyata tidak bermanfaat lagi. Dan hal ini sangat rawan bagi disintegrasi bangsa seperti yang terjadi pada kerusuhan atau konflik sosial yang terjadi di Maluku dan Ambon pada Khususnya yang pecah pada tahun 1999 dan mereda sekitar tahun 2004.

Era Otonomisasi dewasa ini memberikan peluang yang besar bagi pembangunan pedesaan. Ketentuan hukumnya dapat dicatat pada UU. No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU.No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU.No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintah Desa yang tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu untuk mengganti kedua Undang-Undang tersebut maka dikeluarkan UU.No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi kemudian diadakan perubahan lagi terhadap Undang-Undang ini yang terlalu sentralisasi (dititik beratkan pada pusat) dengan UU.No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih dititik beratkan pada Daerah (Desentralisasi/Otonomi Daerah). Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara nyata mengatur pula mengenai Desa atau dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan setempat,

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kota Ambon mempunyai karakteristik tersendiri dimana sebagian besar wilayah Kota Ambon terdiri atas Negeri dengan dengan adat istiadat yang hidup, diakui, dihormati, dipertahankan, dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat adat serta adanya bagian wilayah Negeri-Negeri yang telah dibentuk menjadi Desa dan Kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan aspirasi masyarakat pada Negeri di Kota Ambon menghendaki agar sistem penyelenggaraan pemerintahan dikembalikan menurut adat istiadat dan Hukum Adat yang berlaku di Kota Ambon. Oleh karena itu Negeri di Kota Ambon perlu diatur dan ditata kembali berdasarkan hak asal-usul adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Untuk itu Pemerintah Propinsi Maluku telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 14 tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Propinsi Maluku (Lembaran Daerah Propinsi Maluku tahun 2005 No.14). Oleh karena itu Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon tahun 2008 No.03 Seri E No.01). Untuk jelasnya beberapa ketentuan umum Dalam Peraturan Daerah ini dapat dijelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan : Negeri, Desa, Petuanan, Pemerintah Negeri, Saniri Raja Pati, Raja, Saniri Negeri Lengkap, Saniri Besar, Soa, Soa Parenta, Kepala Soa, Kampong, Kepala Kampong, Marinyo, Latupati dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri (Effendy Ziwari, 1987).

1. *Negeri* adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat dan hukum adat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. *Desa* adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berada dalam wilayah petuanan Negeri yang diakui, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

3. *Petuanan* adalah daerah yang meliputi daratan dan lautan yang berdasarkan hukum adat Ambon berada dibawah penguasaan Negeri.
4. *Pemerintah Negeri* adalah Raja, Saniri Rajapati dan Saniri Negeri Lengkap sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negeri.
5. *Pemerintahan Negeri* adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Lengkap dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. *Raja* adalah gelar kepala Pemerintahan Negeri yang merupakan unsur penyelenggaraan kesatuan masyarakat hukum adat, berfungsi mengurus hukum adat dan adat istiadat serta tugas-tugas pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. *Saniri Rajapati* atau Dewan Negeri adalah penyelenggara Pemerintahan Negeri.
8. *Saniri Negeri Lengkap* adalah Badan Legislatif yang terdiri dari wakil-wakil Soa, Kepala Adat, Tua-Tua Negeri, Kepala Tukang, Kewang serta unsur-unsur lain yang bertugas membantu Kepala Pemerintahan Negeri membuat peraturan-peraturan Negeri serta melakukan fungsi pengawasan.
9. *Saniri Besar* adalah rapat terbuka bersama Saniri Rajapati dan Saniri Negeri Lengkap dengan seluruh anak Negeri yang sudah dewasa untuk mendengar laporan/keterangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta penyampaian rencana pembangunan Negeri oleh Rajapati.
10. *Soa* adalah suatu persekutuan teritorial geneologis yang ada di Negeri, yang terdiri dari beberapa Matarumah.
11. *Kepala Soa* adalah kepala Persekutuan Teritorial geneologis yang bertugas membantu Raja dalam pelaksanaan Pemerintahan Negeri, mewakili Soa.
12. *Soa Parenta* adalah Matarumah yang berdasarkan hukum adat dan adat istiadat dipercayakan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Negeri.

13. *Marinyo* adalah perangkat Saniri Rajapati yang disertai tugas menyampaikan berita yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan maupun adat istiadat Negeri.
14. *Kampung* adalah suatu persekutuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dalam petuanan suatu Negeri.
15. *Kepala Kampung* adalah kepala persekutuan masyarakat yang membantu Raja dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan pada suatu wilayah tertentu dalam petuanan Negeri.
16. *Latupati* adalah lembaga musyawarah para Raja untuk membicarakan kepentingan bersama antar Negeri.
17. *Lembaga Kemasyarakatan Negeri* adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Negeri yang merupakan mitra Pemerintah Negeri dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Gambar 1: Peta Pulau Ambon

C. Pemekaran Kecamatan di Kota Ambon

Sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 1979, maka Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon dibagi dalam 3 (tiga) Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Nusaniwe dengan pusat pemerintahan di Benteng.
- b. Kecamatan Sirimau dengan pusat pemerintahan di Karang Panjang.
- c. Kecamatan Teluk Ambon Baguala dengan pusat pemerintahan di Passo

Kemudian ketiga Kecamatan tersebut diatas dimekarkan lagi menjadi 5 (lima) Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon No.2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Leitimur Selatan dan Kecamatan Teluk Ambon.

Adapun dasar pertimbangan pemekaran Kecamatan ini adalah :

- a. Bahwa perkembangan penduduk di Kota Ambon yang pesat serta dinamisasi dan mobilisasi yang tinggi, adanya perubahan dan kemajuan dibidang pemerintahan daerah dan pelayanan public memerlukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- b. Bahwa akibat dari perkembangan sebagaimana dimaksud diatas, Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Teluk Ambon Baguala saat ini kurang lagi maksimal untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- c. Bahwa luasnya wilayah administrasi Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Teluk Ambon baguala mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang optimal. Karenanya dipandang perlu memperpendek rentang kendali pelayanan agar akses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
- d. Bahwa adanya aspirasi masyarakat yang menginginkan kemudahan-kemudahan untuk menjangkau pusat-pusat pemerintahan dengan lebih cepat dan tepat waktu serta untuk mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- e. Bahwa wilayah-wilayah di Leitimur Selatan dan Teluk Ambon telah layak menjadi pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi

setingkat kecamatan untuk dapat mendorong dan / atau mempercepat peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mengembangkan potensinya dan menciptakan ruang bagi terselenggaranya interaksi penduduk melalui sarana pemerintahan yang disediakan.

- f. Bahwa wilayah-wilayah di Leitimur Selatan dan Teluk Ambon telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.4 tahun 2001 untuk pembentukan kecamatan.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, maka kemudian dibentuklah Kecamatan Leitimur Selatan dan Kecamatan Teluk Ambon. Kecamatan Leitimur Selatan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sirimau dan sebagian wilayah Kecamatan Teluk Ambon Baguala, yang terdiri dari 8 (delapan) negeri, yaitu :

1. Negeri Hatalai
2. Negeri Kilang
3. Negeri Ema
4. Negeri Naku
5. Negeri Hukurila
6. Negeri Leahari
7. Negeri Rutong
8. Negeri Hutumuri

Dengan dibentuknya Kecamatan Leitimur Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah administrasi Kecamatan Sirimau selanjutnya dikurangi dengan wilayah administrasi Kecamatan Leitimur Selatan yang meliputi Negeri Hatalai, Kilang, Ema Naku dan Hukurila. dalam pasal 3.

Untuk wilayah Kecamatan Teluk Ambon, berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Teluk Ambon Baguala yang terdiri dari :

1. Negeri Hunuth / Durian Patah
2. Negeri Poka
3. Kelurahan Tihu
4. Negeri Rumahtiga
5. Negeri waiyame
6. Negeri Hatiwe Besar

7. Negeri Tawiri
8. Negeri Laha

Dengan dibentuknya Kecamatan Teluk Ambon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah administrasi Kecamatan Teluk Ambon Baguala adalah setelah dikurangi Negeri Waiyame, Hatiwe Besar, Tawiri dan Laha (pasal 4 ayat 1). Jadi jelasnya wilayah Kecamatan Leitimur Selatan meliputi Negeri-Negeri : Hatalai, Kilang, Ema, Naku, Hukurila, Hutumuri, Rutong dan Leahari.. Sedangkan wilayah Kecamatan Teluk Ambon meliputi Negeri-Negeri : Hatiwe Besar, Tawiri, Laha, Rumahtiga, Waiyame, Poka, Hunuth / Durian Patah.

Kecamatan Leitimur Selatan dengan ibukotanya di Negeri Leahari mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah utara dengan Kecamatan Teluk Ambon Baguala.
- b. Sebelah timur dengan Laut Banda.
- c. Sebelah selatan dengan Kecamatan Nusaniwe.
- d. Sebelah barat dengan Kecamatan Sirimau.

Kecamatan Teluk Ambon dengan ibukotanya di desa Waiyame mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah utara dengan Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.
- b. Sebelah timur dengan Kecamatan Teluk Ambon Baguala.
- c. Sebelah selatan dengan Teluk Ambon
- d. Sebelah barat dengan Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah

Seperti diketahui, penyelenggaraan pemerintahan di Kota Ambon mempunyai karakteristik tersendiri dimana sebagian besar wilayah Kota Ambon terdiri atas Negeri dengan adat istiadat yang hidup, diakui, dihormati, dipertahankan, dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat adat (Cooley.F.E, 1962), serta adanya bagian wilayah Negeri-Negeri yang telah dibentuk menjadi Desa dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa, serta Peraturan Daerah Propinsi Maluku No.14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Pemerintahan Propinsi Maluku). Sehubungan dengan itu telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Ambon No.3 Tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon. Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa Negeri yang berada dalam wilayah Kota Ambon merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal-usul, hukum adat setempat serta diakui oleh pemerintah, dan pada Pasal 4 dijelaskan bahwa Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat selain memiliki cirri-ciri petuanan dengan batas-batasnya, juga dicirikan antara lain dengan adanya :

1. Nama Teon Negeri
2. Baileo
3. Batu Pamali
4. Matarumah asal/asli
5. Soa
6. Upacara adat Negeri
7. Unsur adat istiadat yang diakui masyarakat adat setempat.

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 5 bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dibentuk Kampong di Negeri, dan pada Pasal 6 dijelaskan bahwa Kampong dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa, dan bahwa Desa yang sudah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini yang berada dalam wilayah petuanan Negeri tetap diakui keberadaannya (Pasal 8).

Berikut merupakan daftar nama Negeri dan Desa dari kelima Kecamatan di Kota Ambon yang dapat dicatat sebagai berikut :

I. Kecamatan Nusaniwe

1. Negeri Nusaniwe
2. Negeri Latuhalat
3. 3.Negeri Seilale
4. Negeri Amahusu
5. Negeri Urimessing

II. Kecamatan Sirimau

1. Negeri Soya
2. Negeri Batur Merah
3. Negeri Hatiwe Kecil
4. Desa Galala

III. Kecamatan Teluk Ambon Baguala

1. Negeri Halong
2. Negeri Passo
3. Desa Lata
4. Desa Negeri Lama.
5. Desa Nania
6. Desa Waiheru

IV. Kecamatan Leitimur Selatan

1. Negeri Hutumuri
2. Negeri Rutong
3. Negeri Leahari
4. Negeri Ema
5. Negeri Hatalai
6. Negeri Naku
7. Negeri Kilang
8. Negeri Hukurila

V. Kecamatan Teluk Ambon

1. Negeri Laha.
2. Negeri Tawiri
3. Negeri Hatiwe Besar
4. Negeri Rumahtiga
5. Desa Waiyame
6. Desa Poka
7. Desa Hunuth/Durian Patah

D. Kedudukan Negeri Dan Desa Pada Strategi Pengembangan Wilayah Kota Ambon

Dalam era pemerintahan sampai sekarang ini ditetapkan skenario pengembangan Kota Ambon merupakan elaborasi dari rencana tataruang yang telah ada dan kebijaksanaan pengembangan lain yang bersifat makro dan mikro. Konsep ini mengacu pada fungsi dan peran, arah pengembangan Kota, identifikasi dan kebijaksanaan kawasan pengembangan. Dengan memperhatikan kondisi, potensi sumber daya, sarana dan prasarana, pola pengembangan dan kecenderungan orientasi wilayah, Kota Ambon dikelompokkan dalam 4 (empat) satuan wilayah pengembangan (SWP) yakni :

1. SWP I, meliputi sub wilayah pusat Kota dan sub wilayah Kilang dengan pusat pelayanan di Kota Ambon.
2. SWP II, meliputi sub wilayah Passo dan sub wilayah Hutumuri dengan pusat pelayanan di Passo.

3. SWP III, meliputi sub wilayah Rumahtiga dan Sub wilayah Laha dengan pusat pelayanan di Rumahtiga.
4. SWP IV, meliputi sub wilayah Latuhalat dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Amahusu.

Gambar 3: Peta Satuan Wilayah Pengembangan Pembangunan Kota Ambon

Kemudian, wilayah kota dibagi menjadi 7 sub wilayah pengembangan masing-masing dengan pusat-pusat pelayanan. Pusat-pusat pelayanan ini diharapkan dapat ditingkatkan menjadi pusat pertumbuhan. Tujuh sub wilayah pengembangan ini adalah sebagai berikut :

1. Sub wilayah pusat kota dan sekitarnya (sebagian Amahusu sampai Latta), akan terus ditingkatkan dan dikembangkan sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan, perdagangan, industri perikanan, aneka industri/kerajinan rakyat, jasa dan perhubungan laut.
2. Sub wilayah Rumahtiga dan sekitarnya dikembangkan sebagai pusat pendidikan tinggi, pemukiman dan usaha pertanian, khusus tanaman pangan dan hortikultura.

3. Sub Wilayah Passo dan sekitarnya akan dikembangkan sebagai kawasan pemerintahan, perdagangan, aneka industri, pemukiman dan pendidikan kejuruan/ketrampilan.
4. Sub Wilayah Laha/Tawiri dan sekitarnya dikembangkan sebagai kawasan pelayanan jasa perhubungan udara, usaha perikanan, industri jasa maritim, pertanian tanaman pangan, pertambangan galian "C".
5. Sub Wilayah Hutumuri dan sekitarnya akan dikembangkan sebagai kawasan perkebunan dan holtikultura, peternakan dan pariwisata.
6. Sub Wilayah Kilang/Naku dan sekitarnya akan dikembangkan sebagai kawasan tanaman holtikultura dan pariwisata.
7. Sub wilayah Latuhalat dan sekitarnya akan dikembangkan sebagai kawasan pariwisata, industri rumah tangga, perkebunan dan peternakan.

Tujuh Sub Wilayah tersebut dapat menjadi basis bagi perkembangan ekonomi sesuai dengan potensinya masing-masing, sehingga peran bagian-bagian wilayah dalam wilayah kota Ambon dapat lebih terarah dan terfokus pada sektor dan sub sektor tertentu. Selanjutnya, berdasarkan PP No. 13 tahun 1979, Kota Ambon memiliki luas 37.700 ha terdiri dari daratan seluas 35.954, lautan seluas 1.755 ha dengan panjang garis pantai sekitar 98 km. Untuk arahan pengembangan Kota Ambon di masa datang sebagaimana tercantum dalam RT/RW Kota Ambon, alokasi pengembangan Kota Ambon, alokasi pengembangan kegiatan di Kota Ambon hendaknya mempertimbangkan :

- Pengembangan fisik pada kawasan pusat Kota, kecuali kegiatan jasa dan perdagangan.
- Pengembangan kegiatan industri diarahkan ke daerah yang tingkat kesesuaian lahannya dengan mempertimbangkan arus transportasi dan kemacetan, serta disesuaikan dengan potensi eksisting dimana kegiatan industri terkonsentrasi.
- Pengembangan areal pemukiman diarahkan sepanjang pesisir Desa Tawiri, Hatiwe Besar, Rumahtiga, Poka, Durian Patah, Waiheru, Nania, Negeri Lama, Passo dan membatasi pengembangan dan pemukiman padat areal yang telah padat.

- Peningkatan areal konservasi pada daerah dengan kemiringan lereng $> 30\%$ yang berfungsi sebagai aquifier zone dan mengembangkan hutan kota pada daerah pusat Kota dengan kemiringan lereng $> 40\%$.
- Mempertahankan lokasi pengembangan pelabuhan udara di Laha.
- Mengembangkan wisata bahari sepanjang pesisir Desa Kilang, Hukurila, Leahari dan sub Wilayah Latuhalat.

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan di Kota Ambon mempunyai karakteristik tersendiri dimana sebagian besar wilayah Kota Ambon terdiri atas Negeri dengan adat istiadat yang hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat adat, serta adanya bagian wilayah Negeri-Negeri yang telah dibentuk menjadi Desa dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa, serta Peraturan Daerah Propinsi Maluku No.14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Pemerintahan Propinsi Maluku). Sehubungan dengan itu telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Ambon No.3 Tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon. Pada Pasal 3 (tiga) dijelaskan bahwa Negeri yang berada dalam wilayah Kota Ambon merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal-usul, hukum adat setempat serta diakui oleh pemerintah.

Sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 1979, maka Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon dibagi dalam 3 (tiga) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Nusaniwe dengan pusat pemerintahan di Benteng.
2. Kecamatan Sirimau dengan pusat pemerintahan di Karang Panjang.
3. Kecamatan Teluk Ambon Baguala dengan pusat pemerintahan di Passo

Kemudian ketiga kecamatan tersebut diatas dimekarkan lagi menjadi 5 (lima) kecamatan (Peraturan Daerah Kota Ambon No.2 Tahun 2006). Kelima kecamatan tersebut adalah :

1. Kecamatan Nusaniwe dengan pusat pemerintahan di Amahusu.
2. Kecamatan Sirimau dengan pusat pemerintahan di Karang Panjang.
3. Kecamatan Teluk Ambon Baguala yang berpusat di Passo.
4. Kecamatan Teluk Ambon yang berpusat di Waiyame.
5. Kecamatan Leitimur Selatan yang berpusat di Leahari.

Daftar Pustaka

Cooleey.F.E, (1962), **Ambonezen Adat : General Description**, Cultur Report Series Number 10

Effendy Ziwar, (1987), **Hukum Adat Ambon Lease**, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.

Leirissa.R.Z. dkk, (1984), **Sejarah Kebudayaan Negeri Maluku**, Proyek IDS N Departemen P & K , Jakarta.

Leirissa.R.Z. dkk, (1999), **Ambonku. Kini, Esok**, Pemerintah Kota Ambon, Maluku.

Pattikayhatu.J.A, (2008), **Sekilas Sejarah Kota Ambon Dan Propinsi Maluku**, PT. Citra Adi Paramita , Jogjakarta.

Pattikayhatu.J.A dkk, (2009), **Sejarah Negeri Dan Desa Di Kota Ambon**, Pemerintah Kota Ambon, Maluku.

Peraturan Pemerintah RI. No.13 tahun 1979

Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 14 tahun 2005

Peraturan Daerah Kota Ambon No.3 Tahun 2008

* Penulis, Kandidat Peneliti pada Balai Arkeologi Ambon